

**ABSTRAK**

Tesis ini berjudul “Kompetensi Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Di Pengadilan Tata Usaha Negara”. Tipe penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Dalam penelitian ini menghasilkan rumusan masalah apakah penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak sesuai dengan susunan badan peradilan yang berlaku di indonesia dan bagaimana upaya banding atas putusan keberatan dari direktorat jenderal pajak dan kepala daerah dalam sistem peradilan tata usaha negara. Dengan melatar belakang pajak merupakan salah satu instrumen penerimaan negara yang sangat penting, sehingga semua peraturan yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pemungutan pajak maupun tata cara penyelesaian sengketa pajak harus jelas. Pengadilan pajak sebagai pelaksana penyelesaian sengketa pajak di harapkan mampu melaksanakan tugas tersebut. Untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana alur penyelesaian sengketa pajak yang berlaku selama ini, yaitu mengenai proses keberatan dan banding, serta kedudukan dari pengadilan pajak dalam sistem peradilan di indonesia. Dalam hal surat ketetapan pajak yang di keluarkan oleh fiskus pada dasarnya merupakan produk dari pejabat tata usaha negara. Apabila wajib pajak tidak setuju atas produk tersebut, maka sesuai hukum administrasi negara, ia dapat mengajukan keberatan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa alur penyelesaian sengketa di pengadilan pajak lebih tepat apabila di lakukan di pengadilan tata usaha negara, karena sesungguhnya yang menjadi pokok perselisihan di pengadilan pajak adalah suatu keputusan yang di keluarkan oleh direktorat jenderal pajak maupun kepala daerah baik propinsi, kabupaten/kota yang jelas merupakan pejabat tata usaha negara.

**Kata Kunci : Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak, Pengadilan Tata Usaha Negara.**

**ABSTRACT**

*This thesis entitled "Competence of Tax Court in Tax Dispute Settlement in State Administrative Court". Tax is one of important instruments of the state's revenue such that all of the regulations relating to both the orders of the implementation of tax collection and the orders of the settlement of tax lawsuit are obvious. The tax court as the implementer of the settlement of tax lawsuit is expected to be able to carry out the task. However, in the implementation the goal of the establishment of the tax court is not yet suitable to the justice and legal certainty as required, both concerning the lawsuit settlement system and the existence of the tax court it self according to the judicature system being effective in indonesia. The objective of this research is to analyze and identify which the extent of the channel of tax lawsuit settlement being effective during this time, concerning the process of existence and appeal, as well as the position of the tax court in the judicature system being effective in indonesia. This research uses a juridical normative approach method, by emphasizing on the literature study to obtain the secondary data. The specification of research used is a descriptive analytical one. The stage of the search conducted is a literature study, and then supported by field study. The data collecting technique used is a literature study, and then the collected data are analyzed in the manner juridical qualitative. The result of research shows that the channel of tax lawsuit settlement is more appropriate when conducted in the public administrative court, because really becoming the basic of the dispute in the tax court is a decision issued by directorate general of tax and regional head of province and regency/city that is obviously official of public administration.*

***Keywords: The Settlement of Tax Lawsuit, Lawsuit Settlement, Official of Public Administration.***